

## **MEMPERKUAT KOHESI SOSIAL DALAM MASYARAKAT PLURAL DALAM KONTEKS BHINNEKA TUNGGAL IKA DI KOTA SUKABUMI**

Bara Izzat Wiwah Handaru  
Sekolah Tinggi Teologi Baptis Kalvari  
E-mail: izzatbara@gmail.com

### **ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara multikultural menjadikan Bhinneka Tunggal Ika dalam mempertahankan semangat persatuan di tengah keragaman budaya, agama, dan etnis. Komunikasi memegang peran sentral dalam memperkuat kohesi sosial melalui pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Artikel ini membahas bagaimana komunikasi yang efektif dapat memfasilitasi dialog antarkelompok, menyebarkan nilai-nilai pluralisme, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan inklusif. Tantangan seperti perbedaan budaya, stereotip, konflik, dampak media sosial, dan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi penghambat utama dalam menjaga kohesi sosial. Karena itu, pendekatan komunikasi yang holistik dan inklusif diperlukan untuk memperkuat solidaritas nasional. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta mengenai literasi kebangsaan, demokrasi, dan kepemimpinan dalam konteks keberagaman, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi; serta membangun pola komunikasi yang efektif untuk memperkuat kohesi sosial. Melalui metode penyuluhan dan diskusi partisipatif, program ini menekankan pentingnya critical thinking dalam menyikapi isu keberagaman serta urgensi pilar kebangsaan bagi masyarakat multikultural. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kesadaran kolektif akan nilai-nilai toleransi dan komunikasi yang konstruktif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Kata Kunci: Komunikasi, Kohesi Sosial, Agama

### **ABSTRACT**

*Indonesia, as a multicultural nation, upholds Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) in maintaining the spirit of unity amidst cultural, religious, and ethnic diversity. Communication plays a central role in strengthening social cohesion through understanding, tolerance, and respect for differences. This article discusses how effective communication can facilitate intergroup dialogue, disseminate the values of pluralism, and encourage community participation in inclusive policies. Challenges such as cultural differences, stereotypes, conflicts, the impact of social media, and socio-economic disparities serve as major obstacles to maintaining social cohesion. Therefore, a holistic and inclusive communication approach is needed to reinforce national solidarity. This community service activity aims to broaden participants' insights on national literacy, democracy, and leadership in the context of diversity; enhance critical thinking, creativity, and collaboration skills; and develop effective communication patterns to strengthen social cohesion. Through counseling and participatory discussions, the program emphasizes the importance of critical thinking in addressing diversity issues and the urgency of national pillars for a multicultural society. The expected outcome is the creation of collective awareness of the values of tolerance and constructive communication in order to realize a harmonious and inclusive society.*

*Keywords: Communication, Social Cohesion, Religion*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 kelompok etnis, serta ratusan bahasa daerah, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan nasional. Dalam keragaman ini, semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu” memiliki makna fundamental

sebagai landasan identitas bangsa. Semboyan ini tidak hanya merepresentasikan kenyataan sosial, tetapi juga mengandung nilai filosofis tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman (Suryadinata, 2017).

Untuk mewujudkan makna sejati dari Bhinneka Tunggal Ika, peran komunikasi menjadi sangat sentral. Komunikasi bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi menjadi sarana utama untuk membangun pemahaman bersama, mengelola perbedaan, dan menciptakan kohesi sosial di tengah keragaman identitas. Melalui komunikasi yang efektif, setiap individu dan kelompok dapat menyampaikan nilai, norma, dan perspektif mereka, sekaligus membuka ruang untuk dialog, empati, dan pengakuan atas keberagaman yang ada (Littlejohn & Foss, 2011).

Pentingnya peran komunikasi juga ditegaskan dalam kerangka hukum nasional, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat 4, yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah” (UUD 1945). Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memastikan setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, dan agama, mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dalam kerangka masyarakat yang adil dan inklusif. Namun demikian, menjaga komunikasi yang efektif untuk mempererat kohesi sosial bukanlah tugas yang mudah. Dalam praktiknya, berbagai tantangan seperti perbedaan nilai budaya, stereotip, prasangka, konflik sosial, penyebaran misinformasi di media sosial, serta kesenjangan sosial ekonomi, kerap menghambat terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Setiap tantangan tersebut membutuhkan strategi komunikasi yang holistik, inklusif, dan berbasis pada prinsip penghargaan terhadap martabat manusia dan pluralisme.

Oleh karena itu, pemahaman tentang peran komunikasi dalam membangun kohesi sosial menjadi semakin relevan dan penting, terutama dalam konteks penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini. Dengan komunikasi yang tepat, bangsa Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan persatuannya, tetapi juga memperkaya kehidupannya melalui penghormatan terhadap keragaman sebagai sebuah kekuatan nasional.

Melalui kajian literatur dan analisis kasus, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor media dalam menggunakan komunikasi sebagai alat strategis untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika di tengah dinamika sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam memperkuat ketahanan sosial bangsa Indonesia.

### **Profil Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik demografis, politik, sosial, dan keagamaan yang kompleks dan beragam. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang kontekstual dan tepat sasaran.

## **Demografi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.503.857 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2021). Tingkat kepadatan penduduk bervariasi, dengan kawasan perkotaan cenderung lebih padat dibandingkan wilayah pedesaan. Komposisi penduduk didominasi oleh suku Sunda, yang dikenal dengan budaya lokal yang kuat, meskipun terdapat pula minoritas etnis lainnya (Heryanto, 2018).

Pemerintahan daerah Sukabumi dipimpin oleh seorang bupati sebagai kepala eksekutif, dibantu oleh perangkat daerah serta DPRD yang menjalankan fungsi legislatif. Dinamika politik lokal cukup aktif, dengan keberadaan berbagai partai politik yang mewakili spektrum ideologi dan kepentingan masyarakat (Setiawan, 2020).

Sektor pendidikan di Sukabumi mencakup seluruh jenjang, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta didukung oleh lembaga formal dan nonformal yang tersebar di berbagai kecamatan (Kemdikbud, 2020). Di sektor kesehatan, layanan disediakan oleh rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan, meskipun aksesibilitas masih menjadi tantangan di beberapa daerah terpencil (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2021). Ekonomi masyarakat umumnya bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan kecil, dan jasa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri rumahan dan pariwisata mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (Prasetyo & Nurhalim, 2022).

Mayoritas penduduk Kabupaten Sukabumi memeluk agama Islam. Di samping itu, terdapat pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dalam jumlah yang lebih kecil. Kehidupan antarumat beragama berlangsung secara harmonis, yang mencerminkan tingginya toleransi dan budaya hidup berdampingan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Dengan mempertimbangkan keragaman ini, program PkM di Sukabumi perlu dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan relevansi, efektivitas, serta keberlanjutan program dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam bentuk seminar/dialog kebangsaan yang mengangkat tema besar mengenai peran komunikasi, kohesi sosial, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya komunikasi yang inklusif, penguatan kohesi sosial, serta internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa metode pelaksanaan yang dirancang secara sistematis dan partisipatif, sebagai berikut:

- a. **Pelatihan dan Workshop**  
Pelatihan dan workshop diselenggarakan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkait komunikasi efektif, kerjasama lintas budaya, serta pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sesi ini, peserta dilibatkan secara aktif melalui simulasi, studi kasus, dan praktik langsung dalam mengelola perbedaan dan membangun toleransi.
- b. **Diskusi dan Forum Publik**  
Diskusi terbuka dan forum publik dilaksanakan untuk mengangkat isu-isu aktual seputar kohesi sosial dan peran komunikasi dalam merawat keberagaman. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya serta mendorong partisipasi aktif dari peserta untuk berbagi perspektif dan pengalaman.
- c. **Pembentukan Kelompok Diskusi dan Kegiatan Pemberdayaan**  
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, dibentuk kelompok diskusi masyarakat yang berfokus pada penguatan komunikasi komunitas dan pengembangan kegiatan pemberdayaan. Kelompok ini diharapkan menjadi wadah berkelanjutan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan menjalin solidaritas lintas identitas.

### **Mekanisme Kerja**

Mekanisme kerja kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui enam tahapan utama, yaitu:

- a. **Analisis Situasi dan Kondisi Mitra**  
Tahap awal ini dilakukan melalui survei lokasi dan identifikasi kebutuhan mitra. Tim PkM melakukan pengumpulan data lapangan dan berdiskusi dengan mitra untuk menyusun jadwal kegiatan yang sesuai dengan konteks lokal.
- b. **Tahapan Persiapan**  
Persiapan kegiatan mencakup peningkatan kapasitas mitra, khususnya para perangkat pelayanan gereja dan layanan kesehatan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pendeta selaku ketua majelis jemaat, Yayasan Wooyang, tim kesehatan, tokoh masyarakat, serta tenaga puskesmas pembantu (pustu) yang mendukung kelancaran kegiatan.
- c. **Tahapan Pelaksanaan**  
Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati bersama. Kegiatan yang dijalankan mencakup sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pelatihan komunikasi, serta pemberian layanan kesehatan kepada warga jemaat dan masyarakat sekitar.

d. Evaluasi Tim PkM

Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim pelaksana untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan terhadap materi sosialisasi, pelatihan, dan pelayanan kesehatan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya. Partisipasi mitra menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan PkM ini. Pihak-pihak yang terlibat secara aktif antara lain:

- a) Pdt. Kristianto, selaku Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja Sukabumi, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di lokasi PkM;
- b) Tenaga penyuluh dan pelatih sebagai pematery utama;
- c) Gereja Baptis Kalvari Sukabumi sebagai penyedia tempat kegiatan;
- d) Yayasan Indonesia Membangun Pemimpin sebagai pemberi dukungan dana;
- e) Kesbangpol Sukabumi yang berperan dalam menghubungkan kegiatan dengan tokoh agama dan masyarakat.

e. Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi akhir dilakukan bersama mitra dan LPPM STT Baptis Kalvari untuk menilai capaian program, baik dari segi penguasaan materi maupun peningkatan keterampilan mitra. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan observasi langsung. Setelah kegiatan berakhir, monitoring keberlanjutan dilakukan secara berkala untuk memastikan dampak program tetap terjaga dan pelayanan komunitas tetap berjalan.

f. Pelaporan Kegiatan

Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan secara menyeluruh oleh tim PkM. Laporan ini mencakup dokumentasi proses pelaksanaan, hasil capaian, kendala, dan rekomendasi untuk kegiatan lanjutan.

## **HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN**

### **Agama dan Realitas Kohesi Sosial Bangsa**

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan personal-spiritual, melainkan juga sebagai realitas sosial yang memiliki dampak struktural terhadap kohesi dan integrasi sosial. Seiring dengan berkembangnya pendekatan sosiologis dalam melihat agama, perannya dalam pembentukan dan penguatan kohesi sosial telah diakui sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan (Baderi, 2016:1). Artinya, agama hadir bukan semata dalam dimensi transendental, tetapi juga sebagai elemen penting dalam dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Keragaman agama, suku, dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia membutuhkan pengelolaan sosial yang serius dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana ditegaskan oleh Taufik Abdullah (2009:3-4), realitas kerusuhan bernuansa SARA yang masih terjadi menunjukkan bahwa kohesi sosial kita belum

kokoh. Dalam situasi ini, agama dapat berfungsi sebagai faktor integratif maupun disintegratif tergantung pada konteks politik, sosial, dan struktural di mana agama tersebut berada.

Secara lebih luas, program PkM ini berusaha untuk merespons tantangan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga kohesi sosial di tengah perbedaan agama, budaya, dan ras. Dalam hal ini, agama sebagai entitas sosial harus dilihat sebagai faktor yang dapat memperkuat solidaritas bangsa, bukan justru menambah ketegangan antar kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah (2009:15-17), ketika agama dipolitisasi atau dipergunakan untuk kepentingan tertentu, maka potensi agama untuk menjaga kerukunan akan terganggu. Oleh karena itu, pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai universal, seperti toleransi, kasih sayang, dan perdamaian merupakan kunci dalam membangun kohesi sosial yang kokoh.

Dalam konteks PkM ini, refleksi yang muncul adalah bahwa keberagaman agama dan budaya, apabila dikelola dengan baik melalui pendidikan dan komunikasi yang inklusif, dapat memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan ini memberikan wawasan penting bahwa agama bisa menjadi kekuatan positif yang menjaga harmoni sosial, asalkan nilai-nilai kebangsaan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan tetap dijaga. Oleh karena itu, keberlanjutan program seperti PkM sangat penting, agar masyarakat di Sukabumi, dan pada tingkat yang lebih luas, Indonesia dapat terus membangun kohesi sosial yang lebih inklusif, berbasis pada rasa saling menghormati antar umat beragama.

### **Refleksi Kegiatan PkM dalam Kerangka Teoritis**

Kegiatan PkM yang mengangkat tema komunikasi dan kohesi sosial dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat sebagai strategi sosial-kultural untuk memperkuat kohesi sosial bangsa melalui pendekatan lintas sektor: komunikasi, pendidikan, dan keagamaan. Agama, dalam kerangka ini, berperan sebagai perekat sosial (*social glue*) yang mempertemukan identitas kolektif bangsa melalui nilai toleransi, keadilan, dan solidaritas (Abdullah, 1978:5). Materi yang disampaikan dalam seminar dan diskusi PkM secara implisit mencerminkan ketiga konsep strategis nasional yang pernah dikembangkan pemerintah: Pancasila sebagai ideologi pemersatu, Trilogi Kerukunan (antarumat, internal umat, dan dengan pemerintah), serta Trilogi Ukhuwah (Islamiyah, Wathaniyah, dan Basyariah). Ketiga konsep ini merupakan kerangka ideologis dalam merawat pluralitas dan mencegah disintegrasi sosial (Abdullah, 2009:15–17).

Kegiatan PkM yang dilaksanakan dengan fokus pada kohesi sosial dan komunikasi lintas agama dapat dilihat sebagai upaya konkret untuk memperkuat solidaritas sosial dalam kerangka teori kohesi sosial yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah (2009:5), yang menyatakan bahwa integrasi sosial dalam masyarakat multikultural sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk mengelola perbedaan dengan bijaksana. Dalam kegiatan PkM, terlihat bahwa salah satu keberhasilan utama adalah kemampuan untuk mengajak masyarakat berbicara secara terbuka

mengenai tantangan yang dihadapi dalam hubungan antar agama, serta pentingnya peran komunikasi dalam menjaga hubungan tersebut.

Seminar yang diadakan menjadi ruang refleksi bagi masyarakat untuk menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai kebangsaan, terutama prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam merawat keberagaman. Dengan mengajak masyarakat untuk berbagi pengalaman dan memahami satu sama lain, program ini berhasil menciptakan atmosfer yang mendukung komunikasi yang inklusif dan saling menghargai. Hal ini selaras dengan pandangan Firdaus Baderi (2016:1) yang menganggap agama sebagai kekuatan sosial yang tidak hanya membentuk struktur teologis, tetapi juga berperan besar dalam mengelola kerukunan sosial di tengah keberagaman.

### **Analisis Sosial: Agama, Politik, dan Kohesi Sosial**

Tantangan kohesi sosial tidak dapat dilepaskan dari interaksi antar sub-sistem sosial, khususnya antara agama, politik, dan ekonomi. Agama sebagai subsistem memiliki kecenderungan untuk saling berpenetrasi (*interpenetration*) dengan subsistem lainnya, yang kemudian berdampak pada struktur dan identitas sosial masyarakat (Abdullah, 1997:7). Ketika interpenetrasi ini tidak terkelola dengan baik, maka muncul risiko ketegangan sosial bahkan radikalisasi, seperti yang pernah terjadi di beberapa negara. Kegiatan PkM tidak hanya penting dari sisi edukatif, tetapi juga sebagai bagian dari rekayasa sosial untuk mendorong praktik dialog lintas agama, memperkuat toleransi, dan membangun komunikasi yang sehat dalam kerangka demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan persamaan hak.

Dalam konteks Kabupaten Sukabumi, agama memegang peran penting dalam kehidupan sosial, yang dapat memperkuat atau justru menghambat kohesi sosial. Agama, meskipun pada dasarnya dapat menjadi faktor integratif dalam masyarakat, juga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik ketika digunakan sebagai alat untuk memperbesar perbedaan atau dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Taufik Abdullah (2009:3-4) menekankan bahwa keragaman Indonesia-baik agama, etnis, maupun budaya-sering kali menjadi titik rawan yang dapat memicu ketegangan sosial. Hal ini terlihat pada kondisi di Sukabumi, di mana meskipun mayoritas penduduk menganut agama Islam, keragaman agama tetap menjadi tantangan dalam menjaga hubungan antar umat beragama.

Namun, politik lokal yang ada di Sukabumi dapat menjadi pendorong penting dalam menciptakan ruang bagi toleransi dan integrasi sosial. Peran pemerintah dan lembaga politik dalam mendukung program-program inklusif sangat diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial. Ketegangan politik yang mungkin muncul, baik dalam arena lokal maupun nasional, seringkali berperan dalam memperburuk perbedaan sosial, namun jika dikelola dengan baik, dapat menjadi faktor pengikat yang mempersatukan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunikasi yang inklusif, program PkM berhasil memperlihatkan bahwa

agama, jika dipahami dengan benar, dapat menjadi sumber kekuatan dalam merawat kerukunan antar umat beragama.

### **Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Evaluasi kegiatan PkM menunjukkan bahwa aspek keagamaan menjadi elemen penting dalam merajut kohesi sosial. Peserta dari berbagai latar belakang kepercayaan dan budaya menunjukkan respons positif terhadap materi yang disampaikan. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam mengatasi stereotip keagamaan yang masih tertanam dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindak lanjut kegiatan PkM perlu memasukkan pendekatan berbasis agama melalui kerja sama dengan tokoh-tokoh lintas iman, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

- a. Pelatihan lintas agama tentang komunikasi damai dan resolusi konflik berbasis nilai-nilai religius universal.
- b. Penguatan literasi agama dalam konteks multikulturalisme, yang menekankan agama sebagai kekuatan moral dan etis, bukan alat politik.
- c. Kolaborasi lintas lembaga, baik pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi keagamaan untuk mengawal keberlanjutan program toleransi dan kebangsaan.
- d. Monitoring dan evaluasi sosial terhadap perubahan sikap, praktik komunikasi, dan pola interaksi sosial masyarakat pasca kegiatan PkM.

Dengan pendekatan seperti ini, agama dapat benar-benar difungsikan sebagai sumber kekuatan kohesi sosial dan bukan sebagai pemicu disintegrasi, sebagaimana pernah dikhawatirkan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia.



Gambar 1. Foto bersama Peserta Kegiatan



Gambar 2. Foto bersama Stakeholder Kegiatan

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi mengungkapkan bahwa agama, politik, dan kohesi sosial merupakan elemen yang saling terkait dan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk hubungan sosial masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sukabumi, keberagaman agama, budaya, dan etnis memberikan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kohesi sosial, terutama melalui pengelolaan komunikasi yang inklusif. Sebagai mayoritas umat Islam, masyarakat Sukabumi juga perlu mendalami nilai-nilai kebangsaan dan toleransi yang dapat merangkul berbagai kelompok agama dan budaya. Agama, meskipun memiliki potensi untuk memicu konflik ketika disalahartikan atau dipolitisasi, juga bisa berfungsi sebagai faktor integratif yang mengikat masyarakat, jika dimanfaatkan secara bijak.

Refleksi atas kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa komunikasi yang inklusif dan pendidikan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebangsaan dapat memperkuat kohesi sosial. Seminar dan workshop yang diadakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya peran agama dalam menciptakan kerukunan sosial. Peserta kegiatan tidak hanya diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai toleransi, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi dan simulasi yang mengajak mereka untuk memahami perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Dengan cara ini, masyarakat di Sukabumi diajak untuk berpikir lebih terbuka dalam merespons perbedaan dan membangun solidaritas lintas agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1978). *Agama dan Masalah Integrasi Nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Taufik. (1997). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Abdullah, Taufik. (2009). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. (2021). *Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2021*. Sukabumi: BPS.
- Baderi, Firdaus. (2016). *Agama dan Integrasi Sosial*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Sosial.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. (2021). *Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2020*.
- Gudykunst, W. B. (2004). *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication*. Sage Publications.
- Heryanto, A. (2018). *Kebudayaan Sunda dalam Dinamika Masyarakat Multikultural*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Data Kerukunan Umat Beragama 2020*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Theories of Human Communication (9th ed.)*. Wadsworth.
- Prasetyo, R., & Nurhalim, T. (2022). "Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah di Sukabumi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2).
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Setiawan, B. (2020). "Partisipasi Politik Masyarakat Lokal di Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Politik Lokal dan Demokrasi*, 5(1), 45–56.

Ting-Toomey, S., & Chung, L. C. (2012). *Understanding Intercultural Communication (2nd ed.)*. Oxford University Press.